

TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN : STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Muhamad Rizki Nuryadin¹⁾, Nia Karniawati²⁾

^{1), 2)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia
[Jl. Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132]
Email : nuryadinrizki3@gmail.com¹⁾, niakarniawati@email.unikom.ac.id²⁾,

ABSTRACT

This research aims to clarify how governance changes dimensions of reorganization, reconstruction, revitalization and regeneration of the Sukabumi district. This study was conducted using descriptive methods and a qualitative approach. The whistleblowers involved in this investigation were a targeted approach consisting of the Deputy Regent of Sukabumi District, Assistant Chairman of the MPR at the state level, Secretary General of the Regional Development Agency, Secretary General of the Housing Management Agency, and Secretary General of the Housing Management Agency. It was used. Director of Education, Director of Health Service, Director of Housing, Spatial Planning and Cleanliness, Director of Legal Affairs, Sukabumi District Secretariat. The study showed that after the change of Sukabumi regency in 2016, there was a change in the scale of the restructuring and improved local vision. The second aspect is reconstruction, which is dynamic and in line with the current evolution of Sukabumi Regency. However, Sukabumi cannot provide public services. In the third aspect, activation, some materials are manufactured but without corresponding regulatory changes. In the fourth dimension, regeneration, on the other hand, things go awry when it comes to the intact physical state. There is a lack of education for human resource development in the social sector, especially in public services. In summary, this study has seen some management transformations, but some have been less than optimal in terms of reframing, restructuring, renewal, and revitalization in Sukabumi. From the impact of this research, authors and readers are expected to experience a change in governance in the Sukabumi district.

Keywords : reorganization government, reframing, restructuring, renewal, revitalization

I. PENDAHULUAN

Transformasi ialah pergantian dari suatu zaman ke zaman tertentu yang terjadi karena adanya inovasi atau perubahan baik structural ataupun prosedur, baik yang terencana maupun tidak. “Transformasi pada dasar merupakan proses yang berlangsung atau sedang terus-menerus. Perubahan tata kelola pemerintahan menjadi penting karena pemerintahan adalah ujung tombak yang bertanggung jawab dalam mencapai cita-cita kesejahteraan. Transformasi ini meliputi mengrangka-ulang (reframing), menstruktur-ulang (restructuring), menyusun-ulang prioritas pembangunan (revitalization) dan pembaharuan (renewal)” (Guilart, 1995)

Seiring berkembangnya zaman dengan tuntutan globalisasi, manajemen pemerintah sudah seharusnya ditransformasikan. Pola manajemen pemerintahan yang tradisional terus berkembang menjadi pola yang lebih modern sebagai implikasi nilai-nilai global. Perubahan yang terjadi pada manajemen

pemerintahan mempengaruhi banyak faktor baik internal maupun eksternal, namun demikian ada tiga faktor dominan yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor struktural, faktor fungsional dan faktor kultural (Robert, Siregar, 2020). Pelayanan masyarakat adalah wujud nyata tugas, pokok kegiatan, dan fungsi dalam sistem pemerintahan. Keseluruhan aspek pemerintahan negara yang mencakup aspek lembaga, tata laksana dan sumber daya manusia (SDM), senantiasa mengarah kepada upaya peningkatan efektifitas dan profesionalism fungsi pelayanan (Yudha & Susanto, 2019).

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan implementasi *e-government*. Pelayanan kepada masyarakat mempunyai arti yang luas di Kabupaten Sukabumi karena tugas dari pemerintahan dan pembangunan mempunyai arti yang saling memperkuat

Menurut (Djalil, 2014) Akuntabilitas hampir menyerupai dengan administrasi publik dan



pemerintahan yang mempunyai arti bahwa akuntabilitas digunakan dengan konsep yang dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, dipersalahkan, dan ketidakbebasan, yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik.

Maka dari itu pemerintah bukanlah penentu baik atau buruknya kualitas pelayanan, tapi pemerintah yang menawarkan kebutuhan dan kepentingan untuk masyarakat. Karna masyarakatlah yang menilai baik atau buruk tergantung pelayanan yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan upaya untuk masyarakat seperti pelayanan sarana dan prasarana lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), lalu menyediakan kebutuhan air bersih secara kuantitas atau kualitas, sistem transformasi yang layak, aman, efisien, dan meningkatkan kualitas Sumber daya alam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui proses pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menciptakan good governance. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu literasi dan dokumentasi. Penggunaan kualitatif guna mendapatkan suatu cara yang sistematis, jelas, dan valid untuk mewujudkan pelaksanaan manajemen pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Penulis mengkaji didalam variabel Transformasi manajemen di kabupaten Sukabumi, yaitu Lingkungan yang berpengaruh terhadap manajemen pemerintahan seperti visi misi organisasi, budaya organisasi, serta sistemnya.

III. PEMBAHASAN

1. BUDAYA ORGANISASI DAN VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Perubahan dalam sebuah tata kelola organisasi didorong oleh beberapa faktor pendukung (Stephen dan Timothy, 2013:213). Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi diatur dalam Perda No 13 Tahun 2009 yang ada pada RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.

2. PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Pembangunan daerah dapat menjangkau semua tingkatan dibidang kemasyarakatan. Capaian selama ini adalah kesejahteraan dan kemajuan yang nyata bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi

ditandai penurunan angka kemiskinan hingga 8%. Itu tercermin dalam tiga dimensi utama: Iman, Pengetahuan, Amal dan Pertumbuhan Spiritual atau Pribadi.

Survey Wakil Bupati Sukabumi mampu mencapai target sebagai komitmen politik kepadabupati yang terpilih. Dari 3 rancangan yang dibuat, ada 5 rancangan pembangunan yang di prioritaskan. Pertama, Membangun pengembangan pariwisata serta infrastruktur di Sukabumi untuk di jadikan tujuan wisata internasional. Kedua, mengoptimalkan sumber daya alam. Ketiga, Meningkatkan efektivitas instansi pemerintahan. Keempat, Meningkatkan kapasitas lokal untuk menciptakan manfaat bersama. Yang terakhir, meningkatkan SDM melalui kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebudayaan.

Pilihan atas sektor dasar harus memastikan bahwa sektor yang lain akan dikembangkan dengan kedua sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi reframing telah terjadi perubahan (Widanarto, Agustinus, 2016). Hal tersebut dilaksanakan karna berkembangnya pada satu sektor akan berdampak baik pada sektor lainnya.

Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Elektronik Pemerintahan Dasar (SPBE) merupakan babak baru penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan praktik tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government. SPBE adalah penyelenggara pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melayani pengguna layanan elektronik. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai implementasi SPBE yang mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hasil dan maturitas pengembangan SPBE antar pemerintah daerah masih sangat bervariasi. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan paradigma dan proses perubahan di bidang administrasi, layanan e-public, dukungan TIK dan manajemen sumber daya manusia.

3. RESTRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Personel restrukturisasi harus berurusan dengan badan korporasi dan daya saing yang diperlukan untuk struktur korporasi yang ramping dan sehat merupakan pertimbangan utama. Instansi pemerintah daerah (Dinas, Instansi. Dinas Kabupaten Sukabumi dan lembaga lainnya) pada hakekatnya diatur dengan undang-undang, yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi membantu melaksanakan



tanggung jawab bupati dalam pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam suatu organisasi, jabatan ialah yang menunjukkan peran dan keistimewaan pegawai ASN. jabatan Bupati akan diselaraskan dengan amanat, tugas, yang telah ditentukan oleh penelitian dan analisis sebelumnya. Berdasarkan kajian, saat ini telah di usulkan untuk mengubah beberapa perangkat yang di sesuaikan dengan jabatan, tugas, serta fungsinya sesuai berdasarkan peraturan perundang undangan.. Keberadaan jasa dan/atau lembaga diatur dengan peraturan pusat, namun terdapat penyimpangan menurut PP NO 18 Tahun 2016 tergantung kebutuhan daerah. Bergantung pada disiplinnya, posisi kelas mungkin sudah dibutuhkan. Namun, tidak perlu menghadiri semua kelas khusus. Departemen hukum membutuhkan staf tambahan setelah beberapa tahun tanpa staf tambahan dan kelas khusus. Masalah mengejutkan mengikuti PP 16 dan jenis layanan sesuai dengan angka kelayakan yang diperlukan. Alokasi tugas dan fungsi lembaga sebagian masih kontroversial dan karena itu perlu dipertimbangkan kembali. Misalnya, jika menyangkut jalan lingkungan, tugas utama mereka adalah ini. Sifat birokrasi harus terlihat dalam kaitannya dengan pengaduan masyarakat yang ditujukan murni kepada OPD. Otoritas publik yang terlibat dalam mempengaruhi penyelenggaraan Kabupaten Sukabumi adalah inspektur informal dan pengawas moral.

4. REVITALISASI

Revitalisasi mengacu pada promosi pembangunan dengan menghubungkan entitas dengan lingkungan. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu provinsi di Jawa Barat dengan luas 4128 km². Wilayahnya ter bagi atas 47 kecamatan serta 385 kelurahan, 40% di antaranya berbatasan dengan laut. Karena letak geografis wilayahnya, Sukabumi kaya akan potensi sumber daya alam dikenal sebagai GURILAP (Pegunungan, Hutan, Laut, Pesisir, dan Sungai). Sumber daya manusia atau penduduk di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.4juta jiwa (KSDA tahun 2017). jumlah ini, SDM yng dibilang cukup besar ini modal untuk SDA.

Dengan mengembangkan Kabupaten Sukabumi di kawasan dengan geopark berstandar dunia , keberadaan kampung adat degnan segala budaya yang ada merupakan salah satu situs budaya yang dikembangkan di kawasan kawasan geopark. Tercapainya tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara dua lingkungan fisik dan non fisik. Dalam hal ini, organisasi Instansi Sukabumi

bukan system yang tertutup, melainkan system yang terbuka dimana harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya (baik fisik maupun immaterial).

Pekerjaan pembangunan yang dilakukan selama ini terfokus pada penyelesaian masalah yang menjadi isu dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Untuk mencapai sasaran indikator pembangunan tersebut, disusun tahapan pembangunan tahunan untuk tahun 2016-2021 yang terdapat pada dokumen RPJMD di Kabupaten Sukabumi.

5. PEMBAHARUAN TRANSFORMASI

Pembaharuan ini berkaitan dengan memberikan setiap individu kemampuan dan tujuan baru, sehingga perusahaan bisa memperbarui diri sendiri. Pembangunan material di Kabupaten Sukabumi fokus terhadap penyediaan infrastruktur daerah.

Pada pengembangan pembangunan sosiokultural atau budaya adalah pembangunan yang lebih menekankan aspek manusia dan sosial. Fokus pembangunan ini adalah pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial. Sehubungan dengan itu diharapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena masyarakat Kabupaten Sukabumi sudah mulai berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi manfaat dan nilai yang dicapai Instansi Pemerintah.

Sukabumi adalah daerah yang paling banyak menarik wisatawan di negara ini. Sukabumi adalah wilayah terluas di Jawa dan Bali. Ini adalah perkebunan peninggalan kolonial. Semuanya memiliki potensi fisik (infrastruktur) dan budaya. Sebagian besar kelembagaan dilakukan dari sudut pandang perkembangan. Semoga lambat laun akan membawa hasil dan capaian yang lebih memuaskan bagi masyarakat dan Inovasi yang mengganggu dan pembangunan infrastruktur yang lebih terencana. Peraturan yang akan dimutakhirkan antara lain peraturan daerah untuk RTRW, peraturan daerah untuk RPJMD dan peraturan terkait dengan relokasi infrastruktur, kawasan, dan permukiman.

IV. KESIMPULAN

Dimensi pertama dilakukan melalui Tujuan Kabupaten Sukabumi 2005-2025 dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Sukabumi melalui Perda No. 13 Tahun 2009 baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan. Dimensi kedua, perubahan struktur pada pemerintah kabupaten Sukabumi, sepenuhnya sesuai dengan pembangunan, dimensi ketiga dengan sedikit revitalisasi tidak didukung dengan perubahan regulasi yang memadai. Sumber daya alam



Kabupaten Sukabumi yang sebagian besar berupa daratan semakin menurun dengan cepat. Hampir semua yang ada di sekitar pantai penuh dengan bangunan. Dimensi terakhir adalah kekambuhan terkait dengan kondisi fisik, semuanya tidak baik secara keseluruhan. Di bidang sosial, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, masih minimnya insentif baik bagi karyawan maupun relawan. Pemimpin memperkenalkan inovasi dalam komunikasi terbuka dengan bawahannya melalui media sosial, yang disambut baik oleh karyawan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi

Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E., Erdinaya, L. K., & Karlinah, S. (2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Creswell, John W. (2012). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33.
- Pitono, Andi, (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah*, IPDN Perss, Jatinangor.
- Robbins, Stephen P. dan Judge Timothy A., (2013) "Organization Behavior, Fifteenth Edition, (Global Edition)", Pearson
- Education Limited, London. Jilson, Calvin dan James F. Hollifield. (2000). *Pathways To Democracy*. London: Routledge
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RM Books: Jakarta.
- Redjo, Samugyo Ibnu. (2009). *Transformasi Manajemen Pemerintahan Kota*. Bandung: API
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Fokusmedia, Bandung.(2013). *Pengantar Ekologi Pemerintahan (Edisi Revisi)*. IPDN Press Jatinangor: Sumedang.
- Hardiyansyah, (2017). *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik (Dalam Perspektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Taufiqurokhman. (2009). *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Formulation, Implementation, and Control 7th Ed. Singapura : Irwin McGraw-Hill.

